Politik Hukum Pengadilan HAM *Ad Hoc* dalam Penegakan HAM di Indonesia

Avivah Firisqi Leksono, Siti Fatimah, Muhammad Adib Alfarisi

Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: siti.fatimah.1@uin-suka.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Legal Politics; <i>Ad Hoc</i> Human Rights Court; Legal Effectiveness; Judicial Independence; Gross Human Rights Violations.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Aug 5, 2025; Direview: Sep 29, 2025; Diterima: Oct 5, 2025; Published: Oct 7, 2025.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107662</p>	<p>The <i>Ad Hoc</i> Human Rights Court was established under Law Number 26 of 2000 as a manifestation of the state's responsibility to uphold justice for gross human rights violations in Indonesia. However, its effectiveness and judicial independence remain problematic due to the dominance of political interests. This study aims to analyze the legal politics of the <i>Ad Hoc</i> Human Rights Court through three dimensions: <i>Ius Constitutum</i>, <i>Ius Operatum</i>, and <i>Ius Constituendum</i>. The research employs a normative legal method with a juridical approach by examining positive legal norms, legal principles, and political dynamics that influence the court's implementation. The findings reveal that in the <i>Ius Constitutum</i> dimension, the establishment mechanism requiring the approval of the House of Representatives (DPR) upon the President's proposal opens room for political intervention and weakens judicial independence. In the <i>Ius Operatum</i> dimension, the court's implementation shows low effectiveness due to weak evidentiary procedures, limited application of the command responsibility principle, and strong political interference. Meanwhile, the <i>Ius Constituendum</i> dimension highlights the need for legal and political reforms through regulatory revisions, institutional strengthening, and the creation of an independent mechanism to ensure substantive justice. Therefore, the legal politics of the <i>Ad Hoc</i> Human Rights Court remain elitist and symbolic, necessitating a reorientation to strengthen accountability, judicial independence, and the protection of victims' rights in cases of gross human rights violations.</p>

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum modern yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu bentuk komitmen negara terhadap perlindungan dan penegakan HAM adalah melalui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan ini berfungsi mengadili pelanggaran

HAM berat yang terjadi sebelum dibentuknya pengadilan HAM permanen, serta sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan dan menjamin akuntabilitas atas pelanggaran yang bersifat sistematis dan meluas. (Suhaeb, 2013: 345).

Meskipun demikian, pelaksanaan HAM *Ad Hoc* menuai kritik karena hasil persidangan yang tidak memenuhi harapan masyarakat, khususnya korban. Dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999, mayoritas terdakwa justru dibebaskan, meskipun laporan investigatif Komnas HAM menunjukkan adanya keterlibatan mereka dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (Putri et al., 2024: 100). Hal ini menimbulkan kesan impunitas dan melemahkan legitimasi negara.

Lebih jauh, Komnas HAM dalam Laporan Tahunan 2022 menyatakan bahwa kendala utama penyelesaian kasus HAM berat di Indonesia adalah lemahnya kemauan politik dan minimnya dukungan institusional dari aparat penegak hukum (Komnas HAM, 2023: 7). Penelitian Alpases Sinaga dan Riwanto memperkuat pandangan tersebut dengan menekankan bahwa tekanan politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan serius bagi Komnas HAM dalam mendorong pengadilan sebagai mekanisme utama penyelesaian kasus HAM berat (Alpases P O Sinaga, 2022: 299). Akibatnya, Pengadilan HAM *Ad Hoc* kerap dipersepsikan sebagai instrumen kompromi politik yang tidak sepenuhnya menghadirkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban (Radjab, 2018: 33).

Dari sisi kelembagaan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-V/2007 telah mengkritik mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang dinilai membuka ruang intervensi legislatif secara berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip independensi kekuasaan kehakiman (Roziki, 2020: 1516). Moh. Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama (MD, 2012: 4). Jika politik hukum lebih menekankan pada kompromi kepentingan politik, maka nilai-nilai keadilan substantif berpotensi tersubordinasi, dan hukum kehilangan peran korektifnya dalam menjamin hak warga negara.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan Yulia Yunara, menilai bahwa Pengadilan HAM *Ad Hoc* lebih berfungsi sebagai formalitas hukum tanpa dukungan politik dan kelembagaan yang memadai untuk mewujudkan keadilan substantif (Yunara, 2019: 3). Lalu, penelitian oleh Andika Yudha Pratama menilai bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc* masih terbatas pada proses peradilan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok (Pratama, 2022: 368). Penelitian oleh Fuad dan Rio Rama Baskara menunjukkan bahwa Pengadilan HAM *Ad Hoc* menghadapi berbagai tantangan, termasuk intervensi politik, kekurangan bukti, serta perlindungan yang tidak memadai bagi saksi dan korban (Fuad & Baskara, 2022: 70).

Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kelemahan teknis pelaksanaan maupun persepsi politik terhadap Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Kajian yang menghubungkan secara langsung politik hukum dengan efektivitas dan independensi pengadilan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaruan melalui analisis tiga dimensi politik hukum, yaitu *Ius Constitutum* (politik hukum yang mendasari pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*), *Ius Operatum* (praktik pelaksanaan serta hambatan yang muncul dalam implementasinya), dan *Ius Constituendum* (arah politik hukum ke depan untuk memperkuat independensi dan peran pengadilan). Dengan kerangka analisis tersebut, penelitian ini berupaya tidak hanya menjelaskan kelemahan pelaksanaan pengadilan, tetapi juga menyoroti bagaimana desain politik hukum itu sendiri dapat menentukan legitimasi, efektivitas, serta peran Pengadilan HAM *Ad Hoc* dalam menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pengadilan HAM *Ad Hoc* tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum yang mendasari pembentukannya. Politik hukum berperan besar dalam menentukan ruang lingkup kewenangan, mekanisme pembentukan, hingga hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis: (1) politik hukum yang melandasi pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia (*Ius Constitutum*), (2) praktik pelaksanaannya serta tantangan yang muncul (*Ius Operatum*), dan (3) arah politik hukum ke depan untuk memperkuat peran pengadilan dalam menegakkan HAM (*Ius Constituendum*).

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada keberadaan dan peran Pengadilan HAM *Ad Hoc* sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti secara khusus bagaimana pengadilan tersebut berfungsi dalam praktik, serta sejauh mana pengaruh politik hukum berdampak terhadap independensinya dalam menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Hipotesis yang diajukan adalah bahwa Pengadilan HAM *Ad Hoc* belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen penegakan keadilan, karena adanya intervensi politik yang signifikan baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya. Intervensi tersebut berdampak pada menurunnya independensi kekuasaan kehakiman, serta menghambat pemenuhan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat yang seharusnya menjadi tujuan utama dari mekanisme peradilan ini. Dengan demikian, keberadaan pengadilan HAM *Ad Hoc* cenderung bersifat simbolis dan belum sepenuhnya mewujudkan prinsip akuntabilitas serta pemulihan hak korban secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, peraturan pelaksana, serta ketentuan konstitusional yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan empiris dengan mengkaji data sekunder seperti laporan tahunan Komnas HAM (2022–2024) dan dokumen kebijakan pemerintah yang merefleksikan implementasi hukum dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterkaitan antara norma hukum, dinamika politik hukum, dan realitas implementasi Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia. Analisis penelitian ini dipetakan ke dalam tiga aspek utama politik hukum, yaitu *Ius Constitutum* untuk menelaah kerangka hukum yang berlaku, *Ius Operatum* untuk menilai pelaksanaan dan problematika dalam praktik, serta *Ius Constituendum* untuk merumuskan arah pembaruan hukum di masa depan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai Pengadilan HAM *Ad Hoc* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi politik, kepercayaan publik, dan komitmen negara terhadap penegakan hak asasi manusia. Untuk memahami secara lebih komprehensif, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada tiga aspek politik hukum yang saling berkaitan. Pertama, politik hukum yang melandasi pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* sebagai dasar normatif (*Ius Constitutum*). Kedua, praktik pelaksanaan pengadilan dan tantangan yang muncul, termasuk dinamika politik yang berdampak pada independensi kekuasaan kehakiman (*Ius Operatum*). Ketiga, arah politik hukum ke depan yang diperlukan untuk memperkuat peran pengadilan dalam menjamin keadilan dan akuntabilitas (*Ius Constituendum*). Analisis ini diharapkan dapat

memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan struktural dan arah pembaruan hukum dalam penegakan HAM di Indonesia.

Politik Hukum dalam Perspektif Teoritis

Secara konseptual, politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu melalui peraturan perundang-undangan dan implementasinya. Politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh negara melalui lembaga atau pejabat berwenang untuk menentukan undang-undang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan, atau diatur. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan tertib, terarah, serta mampu mencapai tujuan negara secara bertahap dan sistematis. Politik dan hukum menjadi dasar dari politik hukum, dengan catatan bahwa pembangunan politik hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan politik secara keseluruhan. Dengan kata lain, prinsip-prinsip dasar pembangunan politik juga berlaku dalam pelaksanaan politik hukum, yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (Fikriana et al., 2024: 107).

Dasar pemikiran ini bertolak dari kenyataan bahwa negara memiliki tujuan yang harus dicapai, dan hukum dijadikan instrumen untuk mengatur berlakunya maupun tidak berlakunya suatu aturan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pemahaman politik hukum mencakup kebijakan resmi negara (*legal policy*) mengenai hukum yang akan diberlakukan atau dicabut, sekaligus menjadi sarana untuk menemukan kebenaran dan memberi makna pada hukum. Semua peraturan yang dibuat dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan politik sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial pada saat peraturan tersebut disusun. Oleh karena itu, hukum dan politik memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, serta politik hukum sendiri dapat dipandang sebagai disiplin ilmu yang menitikberatkan pada aspek hukum demi mencapai tujuan tertentu (Fikriana et al., 2024: 108).

Ius Constitutum*: Dasar Hukum Pengadilan HAM *Ad Hoc

Dasar hukum keberadaan Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia berakar pada UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara itu, Pasal 24 UUD 1945 menjamin prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menjadi fondasi konstitusional bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur keberadaan pengadilan HAM permanen sekaligus mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan.

Selain bersumber dari konstitusi dan undang-undang nasional, dasar hukum Pengadilan HAM *Ad Hoc* juga berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mempertegas kewajiban negara untuk menghormati dan menegakkan hak-hak sipil dan politik warganya. Prinsip-prinsip hukum internasional juga menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan *hostis humani generis* (musuh umat manusia) dan tidak dapat dihapus dengan alasan apapun (*non-derogable rights*). Di tingkat yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 menegaskan pentingnya menjaga independensi pengadilan dalam pembentukan lembaga *Ad Hoc*. Namun, ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun

2000, yang mensyaratkan persetujuan DPR atas usulan Presiden, justru membuka ruang intervensi politik dalam pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* (Roziki, 2020: 1516).

Meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya pembentukan dan pelaksanaan Pengadilan HAM *Ad Hoc* tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan politik. Politik hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam membentuk struktur, fungsi, dan arah dari sistem peradilan, termasuk dalam konteks penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia. Secara konseptual, politik hukum dapat dimaknai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum oleh negara, yang sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan yang dominan. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan politik hukum yang elitis dan sentralistik telah berdampak signifikan terhadap independensi kekuasaan kehakiman, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat oleh aparatur negara atau aktor politik berpengaruh (Enggarani, 2019: 84).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, UUD NRI 1945 telah menegaskan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktiknya, prinsip tersebut mengalami erosi akibat adanya intervensi politik, baik dalam tahap pembentukan lembaga peradilan maupun dalam proses yudisial itu sendiri. Misalnya, pengangkatan hakim *Ad Hoc* yang secara formal diusulkan oleh Mahkamah Agung masih berada dalam sistem politik yang rentan terhadap kompromi kekuasaan, khususnya dengan eksekutif dan legislatif (Rukiah Latuconsina, 2015: 144). Ketergantungan struktural ini menciptakan ruang negosiasi antara kepentingan hukum dan politik, yang pada akhirnya melemahkan independensi peradilan serta mengurangi keberanian hakim dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan kepentingan negara.

Kondisi ini diperparah oleh ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mensyaratkan pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* harus melalui persetujuan DPR berdasarkan usulan Presiden. Mekanisme ini menjadikan proses hukum sepenuhnya tunduk pada kalkulasi politik praktis, bukan berdasarkan urgensi keadilan atau hasil penyelidikan pro justisia dari Komnas HAM. Situasi ini terlihat dalam penundaan atau bahkan pembatalan pembentukan pengadilan dalam kasus-kasus besar seperti Tragedi 1965, Talangsari, atau Trisakti, meskipun dokumen penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Radjab, 2018: 12).

Selain itu, posisi jaksa penuntut umum yang berasal dari lembaga eksekutif menimbulkan potensi konflik kepentingan. Dalam banyak kasus, keputusan untuk melanjutkan perkara ke Pengadilan HAM *Ad Hoc* lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan politik dibandingkan penilaian yuridis. Hal ini bertentangan dengan asas *due process of law* dan prinsip imparialitas yang seharusnya menjadi fondasi penegakan hukum modern (Marzuki, 2010: 175).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa efektivitas lembaga peradilan tidak semata ditentukan oleh kekuatan norma hukum, melainkan sangat bergantung pada *political will* rezim yang berkuasa (Patra, 2018: 127). Tanpa adanya komitmen politik yang kuat untuk mendukung independensi kekuasaan kehakiman dan perlindungan HAM, maka instrumen hukum seperti Pengadilan HAM *Ad Hoc* akan kehilangan efektivitasnya dan hanya berfungsi sebagai legitimasi formal belaka (Indonesia, 2022). Komnas HAM juga menegaskan bahwa penyelesaian kasus HAM berat sangat dipengaruhi oleh dukungan politik terhadap independensi aparat hukum dan lembaga peradilan (Radjab, 2018: 12).

***Ius Operatum*: Pelaksanaan Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia**

Efektivitas Pengadilan HAM *Ad Hoc* dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menjadi sorotan utama. Efektivitas ini dapat dipahami sebagai

kemampuan sistem hukum untuk memenuhi tiga tujuan utama: memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan substantif, serta melindungi hak korban secara optimal (Nurhayati, 2017: 87). Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada standar perilaku yang layak dan teratur di masyarakat, di mana hukum harus menjadi pola tindakan yang konsisten dan berulang dengan tujuan tertentu. Penegakan hukum yang efektif sangat tergantung pada penerapan sanksi yang nyata oleh aparat penegak hukum, sebagai indikator bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Soekanto juga menjelaskan lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2007: 5).

Dalam praktiknya, lima faktor tersebut menjadi kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas Pengadilan HAM *Ad Hoc*:

1. Kaidah Hukum

Hukum harus mencakup keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara keadilan (yang bersifat abstrak) dan kepastian hukum (yang konkret). Oleh karena itu, keadilan harus diprioritaskan dalam penerapan hukum karena hukum juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat (Keysha et al., 2024: 720).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup lembaga dan aparat seperti polisi, jaksa, hakim, konsultan hukum, dan petugas lapas. Efektivitas kinerja mereka dipengaruhi kesejahteraan, regulasi, serta independensi institusional (Husin, 2020: 20).

3. Sarana atau Fasilitas

Bergantung pada infrastruktur pendukung seperti SDM yang terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan, dan pendanaan. Pemeliharaan fasilitas sangat penting agar proses hukum berjalan lancar (Ainul, 2021: 4).

4. Masyarakat

Opini dan kesadaran hukum masyarakat berpengaruh besar terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus diberdayakan dan diedukasi agar peraturan hukum dapat diterima dan ditaati (Akbar Kusuma Hadi, 2022: 227).

5. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai budaya memengaruhi cara hukum diterima dan diterapkan. Agar hukum bisa memengaruhi perilaku masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi secara luas melalui komunikasi formal dan keterlibatan berbagai elemen sosial serta aparat hukum (Nasaruddin et al., 2024: 1445).

Klasifikasi pelanggaran HAM terbagi dalam dua kategori, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat (Karelauw et al., 2022: 1086). Pelanggaran HAM ringan meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi kebebasan berekspresi seseorang. Pelanggaran HAM ringan masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti hak pejalan kaki yang tidak bisa menggunakan trotoar karena dipakai lahan parkir atau lapak pedagang kaki lima. Pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan secara sewenang-wenang, perbudakan, pembunuhan massal atau genosida, serta penghilangan seseorang secara paksa. Pelanggaran HAM berat pun masih sering terjadi di Indonesia, seperti pengusuran secara paksa yang disertai kekerasan oleh aparat negara (Randang, 2018: 10).

Realitas maraknya pelanggaran HAM, baik dalam kategori ringan maupun berat, tercermin dari data tahunan yang diterbitkan Komnas HAM RI. Jumlah pengaduan yang ditangani dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelanggaran HAM bukanlah persoalan sporadis, melainkan

fenomena sistemik yang membutuhkan respons hukum yang kuat. Berikut adalah data penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM RI selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1: Data Pengaduan, Pemantauan, dan Mediasi Komnas HAM Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pengaduan	Pemantauan	Mediasi
2022	3.190 kasus	845 kasus	277 kasus
2023	2.753 kasus	625 kasus	248 kasus
2024	2.305 kasus	709 kasus	213 kasus

Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM 2022–2023 serta Catatan Akhir Tahun Komnas HAM 2024, jumlah kasus pengaduan yang ditangani mengalami fluktuasi: 3.190 kasus (2022), 2.753 kasus (2023), dan 2.305 kasus (2024) (Komnas HAM, 2022) (Komnas HAM, 2023) (Komnas HAM, 2024). Jika ditinjau dari perspektif efektivitas hukum ala Soerjono Soekanto, persoalan utama dalam penegakan HAM terlihat pada:

1. Kaidah Hukum
Indonesia memang telah memiliki kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, substansi hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas pelanggaran HAM berat yang umumnya terstruktur dan melibatkan aktor negara. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan pengaturan yang adaptif terhadap mekanisme pembuktian dalam kejahatan luar biasa. Hal ini terlihat pada kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, di mana meskipun terdapat laporan mendalam dari lembaga resmi, tujuan keadilan sulit tercapai karena norma hukum yang ada tidak memadai untuk menjerat pelaku yang berada dalam rantai komando atau memiliki keterlibatan struktural (Nasir et al., 2023: 247).
2. Penegak Hukum
Efektivitas hukum dalam konteks Pengadilan HAM *Ad Hoc* sangat ditentukan oleh profesionalisme, independensi, serta kapasitas lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas internal. Kasus-kasus kekerasan oleh aparat, seperti penembakan terhadap tiga polisi oleh oknum TNI di Way Kanan maupun penembakan pelajar oleh polisi di Semarang, memperlihatkan adanya resistensi terhadap pemeriksaan terbuka yang objektif. Kondisi ini menegaskan bahwa integritas dan keberanian aparat penegak hukum masih menjadi persoalan serius yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas peradilan HAM (Viranti et al., 2025: 98).
3. Sarana atau Fasilitas
Penegakan hukum yang efektif menuntut dukungan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta perangkat investigasi yang modern. Namun, realitas menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan belum mampu mengimbangi banyaknya pengaduan masyarakat. Tingginya jumlah kasus yang tidak tertangani secara langsung oleh Komnas HAM setiap tahunnya menjadi indikator lemahnya dukungan sarana dan fasilitas, sehingga proses penegakan hukum, termasuk melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*, belum berjalan optimal (Patra, 2012: 41).
4. Masyarakat
Partisipasi publik dalam menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM memang tergolong tinggi, namun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakjelasan hasil penyelesaian

kasus dan minimnya transparansi dalam proses hukum. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya semangat masyarakat untuk terus terlibat dalam mekanisme hukum atau mendukung sistem peradilan secara lebih luas, sehingga melemahkan legitimasi proses penegakan HAM di Indonesia (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, 2023: 5).

5. Budaya Hukum

Masih kuatnya budaya impunitas dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat negara menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan belum mengakar secara merata dalam pelaksanaan hukum. Ketika pelaku berasal dari institusi yang kuat secara struktural, penegakan hukum sering kali tumpul ke atas. Situasi ini tidak hanya merusak legitimasi lembaga hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan korban dan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menegakkan hak asasi manusia secara setara (Alya & Suherman, 2024: 238).

Kondisi ketidakefektifan yang telah dianalisis berdasarkan lima unsur tersebut paling tampak dalam kinerja Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Hal ini menjadi gambaran konkret dari lemahnya efektivitas hukum dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana pengadilan ini bekerja dalam kerangka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Meskipun Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum tersebut, implementasinya belum mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang utuh bagi korban. Lemahnya proses investigasi dan pembuktian menjadi hambatan utama dalam pencapaian keadilan substantif (Wardani & Suroto, 2023).

Selain hambatan teknis, faktor politik kontemporer juga menunjukkan pengaruh besar terhadap efektivitas pengadilan. Pada tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, mendeklarasikan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu akan diarahkan sesuai instruksi Presiden (Sulistyo, 2024). Namun, pernyataan tersebut tidak segera diikuti langkah konkret pemerintah. Kondisi ini menimbulkan keraguan serius terhadap komitmen negara, dan mempertegas bahwa mekanisme peradilan HAM, termasuk Pengadilan HAM *Ad Hoc* masih rentan dijadikan simbol formal yang tidak menyentuh akar persoalan struktural.

Ketergantungan tinggi terhadap keputusan politik juga menciptakan celah serius dalam independensi yudisial. Proses hukum menjadi sangat dipengaruhi oleh kalkulasi kekuasaan, bukan kepentingan korban (Asshiddiqie, 2015: 245). Dalam kasus Timor Timur misalnya, hampir seluruh terdakwa dibebaskan meskipun terdapat laporan mendalam dari Komnas HAM dan TGPF (Robet, 2014: 85). Hal serupa terjadi dalam kasus Tanjung Priok, di mana proses peradilan diwarnai kegagalan procedural dan kurangnya perlindungan terhadap saksi. Situasi ini memperkuat budaya impunitas dan memperlemah legitimasi negara dalam penegakan HAM (Radjab, 2018: 12).

Kelemahan lain terletak pada hukum acara yang diterapkan. Kejahatan luar biasa seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat diproses hanya dengan hukum pidana konvensional (Ika Novitasari & Asrullah, 2022: 430). Namun, praktik pengadilan masih bergantung pada pembuktian langsung dan mengabaikan sifat sistematis kejahatan, termasuk keterlibatan rantai komando (Khair & Wahyuni, 2023: 96). Keterbatasan ini membuat banyak aktor kunci lolos dari jerat hukum. Padahal, kejahatan HAM berat kerap dilakukan secara terorganisir, sehingga memerlukan mekanisme pembuktian lebih kompleks, termasuk penggunaan dokumen resmi, pola sistematis kekerasan, serta kesaksian korban maupun pelaku tingkat bawah (Sinaga & Zukriadi, 2025: 359).

Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab komando juga masih lemah. Doktrin ini memungkinkan penuntutan terhadap pelaku dengan kewenangan struktural, meski tidak terlibat langsung (Ticoalu et al., 2023: 5). Sayangnya, prinsip ini jarang digunakan secara efektif. Dalam kasus Timor Timur dan Abepura, aktor intelektual justru tidak tersentuh, sementara pelaku lapangan dijadikan kambing hitam (Firdiansyah, 2021: 12). Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, memperburuk rasa keadilan bagi korban, sekaligus memperkuat impunitas.

Intervensi politik dalam pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* semakin memperlemah efektivitas penegakan hukum. Prosedur yang mensyaratkan persetujuan DPR membuat proses yudisial tunduk pada kalkulasi politik. Pertimbangan politik sering kali tidak sejalan dengan kepentingan korban, tetapi lebih pada stabilitas kekuasaan (Rengku, 2025: 1309). Kasus penembakan tiga polisi oleh oknum TNI di Way Kanan atau penembakan pelajar di Semarang menunjukkan lemahnya independensi hukum (Riduan, 2025: 1). Kondisi ini membuktikan bahwa mekanisme hukum tidak mandiri, tetapi dikendalikan oleh dinamika kekuasaan. Ketergantungan proses hukum terhadap persetujuan politik menunjukkan bahwa penegakan hukum kehilangan independensinya, dan aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan fungsi hukum secara mandiri. Selain itu, intervensi politik ini juga melemahkan kaidah hukum yang seharusnya bersifat umum dan objektif, karena pelaksanaannya dikendalikan oleh mekanisme kekuasaan yang bersifat selektif (Iqsandri, 2022: 2).

Dampak dari ketidakefektifan ini sangat besar bagi korban. Banyak korban merasa kecewa terhadap proses peradilan yang formalistik, tidak berpihak pada mereka, dan gagal memberikan pengakuan serta pemulihan yang layak. Sebagian besar kasus berakhir dengan hukuman ringan atau bebaskan pelaku. Negara juga tidak menyediakan mekanisme reparasi yang memadai, baik berupa kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi (Supriyadi Widodo Eddyono, 2016: 13). Sebagai akibatnya, korban tidak hanya kehilangan keadilan, tetapi juga hak untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka yang telah rusak oleh tindak kekerasan tersebut. Padahal, pemulihan korban merupakan prinsip fundamental dalam keadilan transisional sebagaimana dianut dalam berbagai standar internasional (Andi Natsif, 2016: 91-92). Proses pemulihan ini tidak hanya berfokus pada reparasi materiil, namun juga pada aspek pengakuan negara terhadap penderitaan yang dialami korban, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi trauma dan membantu mereka dalam proses rekonsiliasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pengadilan HAM *Ad Hoc* masih jauh dari harapan. Kelemahan hukum acara, minimnya penerapan tanggung jawab komando, serta dominasi politik menjadi penghambat utama keadilan substantif. Dampaknya tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan preseden impunitas yang merusak legitimasi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dan politik yang progresif agar peradilan HAM benar-benar berpihak pada korban, akuntabel, dan memenuhi standar keadilan internasional.

***Ius Constituendum* : Arah Politik Hukum ke Depan**

Berdasarkan berbagai kelemahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Pengadilan HAM *Ad Hoc*, terlihat jelas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih jauh dari harapan. Situasi ini menuntut adanya perumusan arah politik hukum ke depan yang lebih progresif, agar sistem peradilan HAM tidak berhenti pada formalitas kelembagaan, melainkan benar-benar mampu menjamin keadilan substantif, perlindungan terhadap korban, serta penghapusan budaya impunitas.

Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berada dalam persimpangan antara komitmen normatif dan realitas implementatif yang problematik. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional dan mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya perlindungan HAM masih menghadapi tantangan serius. Kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama, di mana lembaga seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan peradilan seringkali tidak memiliki independensi dan kapasitas yang memadai untuk menangani pelanggaran HAM secara efektif (Bahrain et al., 2024: 520). Ketergantungan institusional terhadap aktor-aktor politik, rendahnya akuntabilitas internal, serta minimnya transparansi dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat menyebabkan stagnasi dalam penyelesaian berbagai kasus (Ticoalu et al., 2023: 6). Selain itu, peran politik dalam proses yudisial terlihat jelas dalam mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang masih mensyaratkan persetujuan politik melalui DPR atas usulan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Hal tersebut menimbulkan persoalan serius dalam prinsip *due process of law* dan mengaburkan objektivitas penegakan keadilan.

Di sisi lain, persoalan diskriminasi struktural terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, masyarakat adat, dan minoritas agama masih marak dalam berbagai kebijakan maupun tindakan aparat negara. Banyak peraturan daerah yang memuat ketentuan diskriminatif, dan upaya *judicial review* sering kali gagal karena tidak adanya keberpihakan nyata dari institusi peradilan terhadap prinsip-prinsip HAM (Patra, 2022: 128). Ketidaksetaraan sosial dan budaya patriarki semakin memperburuk perlindungan terhadap kelompok rentan, menjadikan pelanggaran HAM sebagai persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. Dalam konteks digital, tantangan HAM semakin kompleks. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi kerap kali dibatasi oleh regulasi seperti UU ITE, yang implementasinya sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau membatasi kebebasan pers (Ramadani et al., 2025: 8). Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi dalam politik hukum Indonesia, yang satu sisi menjunjung tinggi HAM secara formal, namun di sisi lain mempertahankan instrumen legal yang represif.

Tantangan lainnya adalah lemahnya kapasitas dan integritas aparat penegak hukum. Minimnya pelatihan khusus yang berbasis pendekatan keadilan transisional, serta tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban, membuat banyak kasus HAM tidak mampu diusut secara menyeluruh. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif korban, sehingga proses hukum cenderung mengutamakan pendekatan administratif dan prosedural tanpa menyentuh esensi keadilan substantif (Rukiah Latuconsina, 2015: 145). Selain itu, keberadaan jaksa penuntut dari institusi eksekutif seperti Kejaksaan Agung juga menyimpan potensi konflik kepentingan, terlebih dalam kasus yang melibatkan aparat negara. Dalam konteks ini, prinsip imparsialitas menjadi sulit diwujudkan karena keputusan hukum lebih sering dipengaruhi oleh kalkulasi politik ketimbang analisis yuridis (Marzuki, 2010: 187).

Ketika politik hukum tidak secara eksplisit mendukung upaya pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban, maka sistem peradilan cenderung bersikap selektif, inkonsisten, dan tidak sensitif terhadap keadilan substantif. Sistem pertanggungjawaban individual (*individual criminal responsibility*) yang digunakan dalam pengadilan juga sering berbenturan dengan kepentingan institusional negara, terutama ketika pelaku adalah aktor negara dengan kedudukan struktural tinggi (Mulyani, 2023: 16). Akibatnya, banyak pelaku utama tidak tersentuh hukum, sementara pelaku lapangan dijadikan satu-satunya target penuntutan.

Secara internasional, independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat fundamental dalam menjamin penegakan HAM yang efektif dan adil (Sanjaya, 2019: 9). Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, Indonesia berkewajiban secara normatif untuk menyesuaikan sistem peradilan agar sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun kenyataannya, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari standar yang ditetapkan, terutama karena arah politik hukum dalam negeri belum menjadikan penegakan HAM sebagai prioritas kebijakan.

Untuk itu, langkah reformasi dalam bidang politik hukum sangat mendesak. Reformasi tersebut mencakup beberapa aspek krusial sebagai berikut:

1. Revisi terhadap prosedur hukum acara yang digunakan dalam Pengadilan HAM *Ad Hoc* agar lebih akomodatif terhadap karakteristik kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) termasuk pengakuan terhadap pola kejahatan yang sistematis dan terstruktur, serta mekanisme pembuktian tidak langsung yang mempertimbangkan dokumen, pola kekerasan, dan prinsip tanggung jawab komando.
2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa yang menangani perkara HAM berat. Diperlukan pelatihan khusus berbasis keadilan transisional, perlindungan saksi, metode penyidikan berbasis struktur kekuasaan, serta pendekatan *victim-centered justice*. Penguatan kapasitas ini juga harus dibarengi dengan penyediaan anggaran dan dukungan logistik yang memadai.
3. Penguatan mekanisme independen dalam pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Reformulasi ini harus mengarah pada penghapusan ketergantungan pada persetujuan politik, dengan mendorong sistem otomatisasi pembentukan pengadilan berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan keputusan Kejaksaan Agung. Hal ini dapat dicapai melalui amandemen terhadap UU No. 26 Tahun 2000, sehingga jalur hukum tidak lagi terdistorsi oleh intervensi politik.
4. Penataan ulang politik hukum nasional untuk memastikan bahwa penegakan HAM berat ditempatkan sebagai prioritas hukum dan moral negara, bukan sekadar wacana normatif. Ini memerlukan perumusan ulang arah kebijakan hukum nasional oleh Presiden dan DPR agar prinsip imparialitas, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap korban menjadi kerangka utama peradilan HAM.
5. Distribusi tanggung jawab kelembagaan, yakni:
 - a. DPR RI diharapkan dapat melakukan revisi terhadap regulasi yang bertujuan memperkuat independensi lembaga peradilan HAM serta menyempurnakan mekanisme pembentukan pengadilan agar proses peradilan dapat berjalan dengan objektivitas dan bebas dari intervensi politik.
 - b. Presiden dan Kementerian Hukum dan HAM seyogianya menunjukkan komitmen politik yang konsisten dalam penegakan HAM berat, serta menjamin agar proses hukum dapat berlangsung secara independen tanpa adanya campur tangan yang dapat mengganggu prinsip keadilan.
 - c. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem rekrutmen serta pengawasan hakim *Ad Hoc* yang profesional, imparial, dan berorientasi pada keadilan substantif guna menjaga integritas dan kredibilitas peradilan HAM *Ad Hoc*.
 - d. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memperkuat mekanisme *pro justitia* serta memastikan kelancaran proses hukum tanpa terhambat oleh tekanan politik maupun intervensi eksternal.

Dengan melakukan reformasi dalam dimensi politik hukum, hukum acara, kapasitas kelembagaan, dan pembentukan institusi, maka efektivitas Pengadilan HAM *Ad Hoc* sebagai instrumen utama penegakan keadilan dapat ditingkatkan secara signifikan. Langkah-langkah ini menjadi prasyarat fundamental untuk mengakhiri budaya impunitas dan membangun sistem hukum yang berpihak pada korban, berintegritas, dan akuntabel.

Tanpa pembaruan menyeluruh dalam aspek hukum, kelembagaan, dan politik, penyelenggaraan HAM di Indonesia hanya akan menjadi komitmen simbolik tanpa realisasi konkret. Reformasi ini menjadi penting tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip universal HAM, tetapi juga sebagai syarat mutlak bagi terbentuknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai efektivitas peradilan HAM *Ad Hoc*, independensi kekuasaan kehakiman, serta tantangan struktural dalam penyelenggaraan HAM, berikut ini adalah poin-poin kesimpulan yang dapat dirumuskan: Pertama, pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik hukum nasional. Mekanisme yang mensyaratkan persetujuan DPR atas usulan Presiden dan pengangkatan hakim *Ad Hoc* yang rentan terhadap intervensi politik menunjukkan bahwa pembentukan pengadilan tidak sepenuhnya independen. Politik hukum yang sentralistik dan elitis membatasi ruang gerak pengadilan, sehingga independensi yudisial dalam menangani pelanggaran HAM berat masih lemah. Kedua, dalam praktiknya, pelaksanaan Pengadilan HAM *Ad Hoc* menghadapi kendala struktural dan prosedural. Proses hukum masih terhambat oleh intervensi politik, kapasitas lembaga penegak hukum yang terbatas, mekanisme pembuktian yang konvensional, serta minimnya penerapan prinsip tanggung jawab komando. Akibatnya keadilan substantif bagi korban sulit tercapai, sementara budaya impunitas tetap mengakar. Ketiga, penegakan HAM di Indonesia masih lemah akibat intervensi politik, rendahnya independensi lembaga, dan kurangnya perlindungan bagi korban. Agar efektif, politik hukum ke depan harus fokus pada reformasi menyeluruh: memperbaiki hukum acara, meningkatkan kapasitas aparat, memperkuat independensi peradilan, dan menempatkan HAM sebagai prioritas utama negara. Dengan langkah ini, Indonesia dapat mengakhiri budaya impunitas dan mewujudkan keadilan yang substantif serta berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, B. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2(2), 1–6.
- Akbar Kusuma Hadi, N. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Alpases P O Sinaga, A. R. (2022). Efektivitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia. *Res Publica*, 6(3), 299–317. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/63036/0>
- Alya, D., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Penanganan Kasus Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(10), 236–243.
- Andi Natsif, F. (2016). Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. *Jurisprudentie Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin*, 3(2), 91–92.
- Asshiddiqie, J. (2015). Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia. In *Menggagas Peradilan Etik di*

- Indonesia*. Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Bahrain, Susanto, D., & Darodjat, T. A. (2024). The Position Of Human Rights in Indonesia Constitutional Law. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 516–524.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Fikriana, A., Ihsan, M. N., & Mardiansyah, B. (2024). Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan. *Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(02), 107–112.
- Firdiansyah, F. (2021). Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu. In *Jurnal Hak Asasi Manusia* (Vol. 13, Issue 13). <https://doi.org/10.58823/jham.v13i13.99>
- Fuad, & Baskara, R. R. (2022). Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Juris Humanity*, 1(September 2021), 70–80.
- Husin, B. R. (2020). Studi Lembaga Penegak Hukum. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Heros Fc. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ika Novitasari, & Asrullah, A. (2022). Human Rights In The Justice System In Indonesia. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 1(2), 423–432. <https://doi.org/10.58526/jsret.v1i2.125>
- Indonesia. (2024). *Menjawab Tantangan Baru : Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023*. Komnas HAM.
- Indonesia, K. N. H. A. M. R. (2022). *Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan & Penegakan HAM*.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1), 1–3.
- Karelauw, M., Anwar, A., & Rehatta, V. J. B. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Milisi dalam Perang Saudara di Nigeria. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1080–1091.
- Keysha, Aulia, N., Bina, Lestari, A., Lika, Latief, M., Noerma, & Fajarwati, K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id*, 2(1), 713–724. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>
- Khair, T. H., & Wahyuni, S. (2023). Penerapan Tanggung Jawab Komando Dalam Militer Pada Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(1), 96. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.50048>
- Marzuki, S. (2010). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu: Melanggengkan Impunity. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 171–193. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art1>
- MD, M. M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Mulyani, H. (2023). *Politik Hukum Penegakan Pelanggaran HAM di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Perspektif Deklarasi Kairo HAM Dalam Islam)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasaruddin, Aly Rizky, & Abdul Jabal Rahim. (2024). Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pelaksanaan Restorative Justice Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1443–1450.

- <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.500>
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Nurhayati, N. (2017). Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 14(2), 83-90. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 149–159.
- Patra, R. (2012). Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *MMH*, 2(41).
- Patra, R. (2018). *The Failure of Settlement of Human Rights Violations*. 7(1).
- Patra, R. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 125–137. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/51746%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/51746/22843>
- Pratama, A. Y. (2022). Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 368. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p367-374>
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. (2023). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://bphn.go.id/>
- Putri, R. W., Putri, Y. M., & Rifai, E. (2024). Exploring the Effectiveness of the Human Rights Court in Indonesia: A Call for Humanitarian Action. *Journal of Liberty and International Affairs, Institute for Research and European Studies - Bitola*, 10(2), 97–118. <https://doi.org/10.47305/jlia24102097w>
- Radjab, S. (2018). *Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia*.
- Ramadani, N., Jauharah, Putra, N. A., Farishi, M. F. Al, & Simanjourang, S. C. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(6), 1–23.
- Randang, I. I. E. (2018). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, 7(3), 5–14.
- Rengku, J. D. (2025). Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (Jsm) e-ISSN*, 6(5), 2809–0543.
- Riduan, A. (2025). *Ujian Integritas Peradilan Militer dalam Kasus Penembakan Tiga Polisi di Way Kanan*. Lampung Viva. <https://lampung.viva.co.id/berita/5886-ujian-integritas-peradilan-militer-dalam-kasus-penembakan-tiga-polisi-di-way-kanan>
- Robet, R. (2014). *Politik Hak Asasi Manusia & Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi hingga Akhir Pemerintahan SBY*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Roziki, M. (2020). *Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-v/2007 tentang mekanisme pembentukan pengadilan ad hoc dalam pelanggaran ham di indonesia*. 1513–1528.
- Rukiah Latuconsina. (2015). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. *Tahkim*, XI(1), 143–168.
- Sanjaya, A. W. (2019). Reformulation of Indonesian Human Rights Courts Competence in the Context of Ius Constituendum. *Rechtside*, 5(2), 6–14.
- Sinaga, W., & Zukriadi, D. (2025). Problematika Pembuktian dan Daluarsa dalam Penuntasan Pelanggaran HAM 1965 – 1966. *Jurnal Nuansa Akademik*, 10(2), 359–376.

- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhaeb, I. D. S. (2013). Retrospectivity and Human Rights in Indonesia: How can Irregularities be Resolved. *Indonesian Journal of International Law*, 10(2), 340–361. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol10.2.301>
- Sulistyo, P. D. (2024). *Terkait Genosida dan Pembersihan Etnis, Yusril: Pertanyaan Wartawan Kurang Jelas*. Kompas.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Z. A. (2016). *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. <http://icjr.or.id>
- Ticoalu, N. M., Massie, C. D., & Pinori, J. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(04), 5.
- Viranti, M., Larasati, P., & Victoria, R. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No . 1 Tahun 2023. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2).
- Wardani, W. I., & Suroto. (2023). The Implementation of Regulations on Human Rights Violations in Legislation in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1530. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1530>
- Yunara, A. Y. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar). *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 2(2), 1–21. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.499>